KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 2 0 5  H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				Final Tidak Final	
A. IDENTITAS PE	ENERIMA PENGHASIL	AN YANG	DIPOTONG					
A.1 NPWP : 68 807 537 3 722 000								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : EMI NINGSIH								
B. PPh PASAL 2	1 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	4 21-402-01		8.490.000	8.490.000	0	5	424.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 02645/LS-TJ/RSJD.AHM/2022								
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 4 dd 0 4 mm						4 mm	2 0 2 2 yyyy	
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor: Tanggalddyyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0								
C.2 Nama Instansi Pemerintah : R			RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi :								
C.4 Tanggal	:	0 4	dd 0 4 mm	2 0 2 2 yyyy				
Nama Penandatangan : RIANDY								
C.6 Pernyataan	.6 <b>Pernyataan Wajib Pajak</b> : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							
			dengan ketentuan yang nik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	c mengatur bahwa d	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	

X4AIQJF0